

## *INTISARI*

Trotoar memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki. Praktik menyimpang yang berupa pengalihan fungsi trotoar menjadi isu fundamental yang menghadapi permasalahan serius. Hak-hak pejalan kaki yang sah seringkali terabaikan ketika trotoar, yang biasanya digunakan untuk berjalan, digunakan untuk tujuan lain. Terutama, ini sangat mengganggu di lokasi-lokasi yang seringkali digunakan oleh masyarakat untuk berjalan kaki. Gangguan ini sangat dirasakan apalagi jika berada di kawasan/pusat perbelanjaan, pasar, kawasan ekonomi, pusat pelayanan publik, tempat berkumpul, dan pusat pendidikan. Alih fungsi trotoar di sekitar wilayah tersebut seharusnya mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Penting diusahakan agar pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman dan aman serta tanpa menemui hambatan. Akan tetapi pada kenyataannya justru di wilayah-wilayah tersebut yang seringkali menjadi sumber gangguan bagi mereka yang berjalan kaki.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian dengan mengkhususkan pada pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah sebuah metode penelitian dengan cara menyelenggarakan serangkaian kegiatan ilmiah dengan runtut dan sistematis melalui pengamatan yang cermat, mendalam, dan terperinci terhadap suatu obyek yang diteliti, yakni tentang fungsi trotoar. Pendekatan studi kasus tersebut memiliki tujuan guna mendapatkan seperangkat pemahaman bersifat mendalam tentang peristiwa tersebut, khususnya mengenai persepsi pengguna trotoar atas fungsi secara eksisting.

Dalam studi mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik, yang berupa trotoar hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengakui pada prinsipnya adanya fasilitas trotoar sangat penting dan dibutuhkan. Diperlukan fasilitas trotoar yang memadai bagi para pejalan kaki. Trotoar diharapkan dapat berperan sebagai jalur yang aman dan nyaman sehingga dapat diakses dengan mudah untuk menuju suatu lokasi. Pada kenyataannya di trotoar penggal jalan Cik Di Tiro dan penggal jalan Soedirman banyak digunakan untuk beberapa bangunan permanen, semi permanen dan non permanen, seperti warung, kaki lima, bengkel, halte bis, sehingga kurang nyaman dan kurang aman untuk pejalan kaki.

Keberadaan dari fasilitas trotoar ini dimaksudkan sebagai alat yang dapat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat khususnya para pejalan kaki, agar dapat berpindah dari satu

tempat ke tepat tujuan yang lain dengan nyaman, cepat serta terjaga keselamatannya. Khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi diimbangi dengan kebutuhan angkutan massal, bahkan juga memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi, maka trotoar memiliki fungsi yang fundamental untuk memberikan akses pejalan kaki agar aman. Dengan adanya aktivitas penjualan jasa dan perdagangan di trotoar maka menjadi pengurang bagi keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

Bertolak dari persepsi Masyarakat terhadap fungsi trotoar yang sudah banyak mengalami perubahan dan pergeseran maka hendaknya ditempuh beberapa langkah untuk mengembalikan fungsi trotoar. Pemerintah sebaiknya menempuh upaya untuk koordinasi dan mengembangkan kerja sama lintas sektor yang erat kaitannya dengan fasilitas public berupa trotoar. Kerjasama ini dapat digalang antara Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, PLN, Dinas Koperasi dan UMKM yang membawahi usaha masyarakat termasuk kaki lima, Satuan Polisi Pamomg Praja yang dilengkapi dengan Kemantren dan Kelurahan yang berkepentingan terhadap pengelolaan trotoar. Pentingnya melakukan koordinasi serta menjaga hubungan komunikasi yang lebih terbuka, penuh dengan transparansi, serta memberikan komitmen secara berkelanjutan antar instansi tersebut, agar monitoring dan evaluasi fungsi trotoar dapat terfasilitasi dengan baik. Hal ini dapat dijadikan sebagai kunci utama agar dapat mencegah terjadinya tumpang tindih peran dan kewenangan pengaturan fungsi trotoar. Di samping itu koordinasi lintas sektor juga dapat mengatasi potensi konflik kebijakan yang mungkin muncul, sebagai akibat penanganan alih fungsi trotoar.

Melalui kerja sama yang erat di antara berbagai instansi pemerintah yang terkait ini, proses maka pengendalian alih fungsi trotoar yang selama ini terjadi akan dapat dikendalikan dengan baik, dapat dilakukan penataan pedagang kaki lima, halte bus, warung, bengkel dapat diminimalisasi dampaknya terhadap pejalan kaki. Koordinasi yang erat antar sektor di sisi lain juga dapat menghasilkan sinergitas di dalam pelaksanaan renovasi atau perbaikan dan pemeliharaan trotoar secara terprogram dan terpadu. Setiap instansi yang terkait semestinya dapat berkontribusi secara proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Keywords: Public perception, Public facilities, Government attention, Yogyakarta**